

RINGKASAN

Penempatan Bidan di desa merupakan kebijakan pemerintah yang tepat dalam rangka meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan serta mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Meskipun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan termasuk penggajiannya sehingga dirasa masih perlu perubahan. Pada survey awal tentang kepuasan kerja Bidan desa PTT di polindes kabupaten Tulungagung dan kabupaten Jombang ketidakpuasan terhadap struktur gaji mencapai 60 %.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik organisasi yang meliputi komitmen manajemen, kebijakan organisasi, kemampuan organisasi, dan jenis kompensasi terhadap pengembangan struktur gaji Bidan desa, mengidentifikasi karakteristik individu Bidan desa PTT, mengidentifikasi kebutuhan biaya hidup minimal Bidan desa PTT, mengidentifikasi kinerja Bidan desa PTT, menganalisis hubungan karakteristik individu terhadap kebutuhan biaya hidup minimal Bidan desa PTT, serta merumuskan struktur gaji Bidan desa berdasarkan analisis determinan kebutuhan biaya hidup minimal dan kinerja Bidan desa PTT.

Penelitian ini termasuk cross sectional studi dengan unit analisis Bidan desa PTT di kabupaten Jombang yang pada saat penelitian masih bekerja sebagai PTT sejumlah 87 orang, dan para penentu kebijakan di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten sejumlah 7 orang.

Karakteristik individu yang diteliti adalah meliputi pendidikan, masa kerja, status perkawinan, dan jumlah anak, untuk kebutuhan biaya hidup minimal yang diteliti adalah meliputi pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan kinerja yang diteliti adalah program kerja dan hasil kerja. Untuk mencari hubungan antara karakteristik individu dan kebutuhan biaya hidup minimal dengan statistik korelasi Pearson.

Dari hasil penelitian ini, secara deskriptif didapatkan gambaran bahwa kebijakan tentang tenaga kesehatan Bidan PTT mengacu aturan pusat, sedangkan tenaga kesehatan Bidan desa diluar PTT diserahkan kepada pemerintah kabupaten setempat. Badan legislatif, pemerintah kabupaten, dinas kesehatan kabupaten Jombang memiliki komitmen untuk mempertahankan keberadaan Bidan desa, berpendapat bahwa struktur gaji Bidan desa saat ini tidak sesuai lagi dan komitmen terhadap pengembangan struktur gaji Bidan desa. Mengenai kebijakan organisasi tentang pengembangan struktur gaji Bidan desa secara teknis diserahkan kepada eksekutif, disediakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), berupa honor tetap dan biaya operasional yang disesuaikan kemampuan daerah.

Hasil analisis hubungan menunjukkan bahwa karakteristik Bidan desa PTT yang meliputi pendidikan, masa kerja, jumlah anak, dan penghasilan total mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kebutuhan biaya hidup minimal (pendidikan: $p = 0,000$; masa kerja : $p = 0,027$; jumlah anak : $p = 0,004$; penghasilan total : $p = 0,001$).

secara maksimal. Dan dari 87 orang Bidan desa PTT >80 % pencapaian hasil kerja kegiatan penyuluhan dan kunjungan rumah cenderung rendah, sedangkan pencapaian hasil kerja untuk kegiatan pelayanan antenatal >90 % cenderung sedang.

Pada penelitian ini juga dilaksanakan FGD yang bertujuan untuk mencari masukan penyempurnaan tentang rumusan struktur gaji Bidan desa di kabupaten Jombang, dan informasi yang dapat digali tentang struktur gaji Bidan desa adalah adanya gaji tetap, jasa medik berdasarkan hasil kerja, dan tunjangan daerah sulit.

Pengembangan struktur gaji Bidan desa yang sesuai adalah meliputi gaji pokok berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan, tunjangan keluarga (suami dan anak), tunjangan fungsional berdasarkan kinerja dan besarnya tanggung jawab, tunjangan jaminan kesehatan, serta tunjangan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji berkala setiap tiga tahun sekali.

Pada penelitian ini dapat dikaji bahwa dalam penentuan struktur gaji Bidan desa berdasarkan beberapa hal yaitu : hasil analisis data penelitian dan penelusuran dokumen sebagai faktor penentu yang meliputi karakteristik organisasi, karakteristik individu Bidan desa PTT, kebutuhan biaya hidup minimal Bidan desa PTT dan kinerja Bidan desa PTT.

Rekomendasi pengembangan struktur gaji Bidan desa yang diajukan peneliti adalah : 1) agar menetapkan gaji pokok berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan, 2) perlu memperhitungkan adanya tunjangan keluarga (suami dan anak), 3) perlu diberikan tunjangan fungsional berdasarkan kinerja dan besarnya tanggung jawab, 4) perlu diberikan tunjangan jaminan kesehatan yang sesuai aturan yang ada dan berlaku, 5) perlu diberikan tunjangan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji berkala sesuai aturan yang ada dan berlaku.